

**PERKEMBANGAN PERSATUAN BOLA VOLI SELURUH INDONESIA  
(PBVSI) TAHUN 1955-1989**

**JURNAL**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Sastra



Oleh:

Witri Nuryani

11407141014

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2017**

## PERKEMBANGAN PERSATUAN BOLA VOLI SELURUH INDONESIA (PBVSI) TAHUN 1955-1989

Oleh: Witri Nuryani (11407141014)  
[Witrinuryani1522@gmail.com](mailto:Witrinuryani1522@gmail.com)

Pasca merdeka, olahraga bola voli telah banyak dimainkan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya permainan yang sangat mudah dan murah membuat olahraga bola voli ini begitu mudah ditemukan. Banyaknya klub-klub bola voli di pelosok tanah air menjadikan salah satu alasan untuk dibentuknya induk organisasi bola voli nasional. PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia) kemudian dibentuk pada tahun 1955. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perkembangan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI), mengetahui pengaruh politik terhadap PBVSI dan mengetahui prestasi PBVSI di kancah internasional pada Tahun 1955-1989.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis, yang meliputi empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Heuristik merupakan tahap pencarian dan pengumpulan data atau sumber-sumber dan informasi yang relevan. Kritik sumber merupakan tahap untuk menguji otentisitas dan kredibilitas sumber-sumber yang diperoleh baik dari segi fisik maupun isi sumber guna menemukan fakta sejarah. Interpretasi merupakan tahap untuk mencari keterkaitan makna yang berhubungan antara fakta sejarah yang didapat sehingga peristiwa sejarah menjadi lebih bermakna. Historiografi merupakan tahap penulisan yang menyampaikan sintesis dalam bentuk karya sejarah.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada tanggal 22 Januari 1955 Indonesia membentuk induk organisasi bola voli nasional yaitu Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI). Kondisi politik di Indonesia yang pada saat itu pasang surut tidak membuat PBVSI vakum untuk mengembangkan prestasinya. Salah satu prestasi di kancah internasional yang diperoleh yaitu Sea Games pada tahun 1981, 1983, 1987 dan 1989 mendapat emas. Sea Games pada tahun 1979, 1983, 1985 Indonesia hanya mendapat perak dan Asean Games pada tahun 1982 Indonesia hanya mendapat posisi ke 6.

**Kata kunci:** *Sejarah, Perkembangan Olahraga, Bola Voli.*

## ABSTRACT

### THE DEVELOPMENT OF THE ENTIRE INDONESIAN VOLLEY BALL (PBVSI) IN 1955-1989

By: Witri Nuryani (11407141014)

[Witrinuryani1522@gmail.com](mailto:Witrinuryani1522@gmail.com)

After independence, sports volleyball have been played by Indonesians. Therefore game easy and cheap make sport volleyball is so easy to find. Many club-club volleyball in the country made one reason to the establishment of a volleyball national organization. PBVSI ( union volleyball indonesia ) then formed in 1955. This study attempts to about the development of the union volleyball indonesia (PBVSI), knows political influence on PBVSI and he knows achievement PBVSI international dikancah in 1955-1989 .

This research in a historical research critical, which includes four first is a heuristic, criticism of, interpretation, and historiografi. A heuristic is the search and the data collection or sumber-sumber and relevant information. Criticism is the source of to test authenticity and credibility sumber-sumber obtained both in terms of physical and the source of find softness facts of history. The interpretation is to find entanglement meaning that deals between the historical fact that got so historic event become more meaningful. Historiografi is phase of writing convey synthesis in the form of history .

The results of research has done shows that on the 22nd january 1955 Indonesia establishes parent organization that is volley ball national unity volley ball all Indonesia ( pbvsi ). The political conditions of indonesia when it tides does not make PBVSI a vacuum to develop his achievement. One achievement in the international arena obtained the sea games in 1981, 1983, 1987 and 1989 have gold. Sea games in 1979, 1983 , 1985 Indonesia have only silver and asean games in 1982 Indonesia have only a position to the 6.

Keywords: history , the development of sport , volleyball .

## A. Pendahuluan

Olahraga merupakan salah satu hasil budaya yang dihasilkan manusia, artinya tidak dapat disebut kegiatan olahraga, jika tidak ada factor manusia yang berperan secara ragawi atau pribadi melakukan aktivitas olahraga itu.<sup>1</sup> Melalui olahraga pula suatu negara dapat menunjukkan pengaruhnya terhadap negara-negara lain. Diawal kemerdekaan, paradigma olahraga di Indonesia merupakan alat untuk mewujudkan eksistensi dan partisipasi bangsa Indonesia dimata dunia. Olahraga juga digunakan pemerintah sebagai Nation and Character Building sesuai dengan semangat zaman yang dibangun pemerintah saat itu. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) digunakan sebagai alat pemersatu bangsa yang saat itu baru merdeka, maka lahirlah PON I pada tahun 1948 di Solo. Meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak pertentangan politik namun pelaksanaan PON I ini masih tetap berlanjut dan mendapat perhatian masyarakat Indonesia yang cukup banyak.<sup>2</sup>

Diawal tahun 1950-an olahraga telah mengalami perluasan makna. Olahraga yang awalnya adalah sebuah upaya untuk menjaga kesehatan jasmani kemudian berubah menjadi ajang persaingan antar negara.<sup>3</sup> Pergeseran makna itulah maka, pemerintah baik lokal maupun nasional terus memperbaiki dan mengembangkan prestasi keolahragaan baik nasional maupun internasional. Melalui beberapa kebijakan dan usaha-usaha pembangunan khususnya olahraga, pemerintah berusaha mewujudkan Indonesia yang sehat melalui beberapa tindakan yang diperlukan saat itu. Misalnya,

---

<sup>1</sup> Agus Kristiyanto, *Pembangunan Olahraga: Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kejayaan Bangsa*, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2012), hlm. xvii

<sup>2</sup> Tri Wahyono, *Aspek Politik Dalam Olahraga: Studi Kasus tentang Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) I di Solo 1948*, Patrawidya, Vol. VIII No. 2 Juni 2007, hlm. 3.

<sup>3</sup> Aulia Rahman, *Olahraga dan Identitas Nasional: Pencak Silat di Indonesia Tahun 1950-1970*, Tesis, (Yogyakarta: UGM, 2002), hlm. 30.

pembangunan stadion, pemenuhan fasilitas, dan upaya memperbaiki kualitas atlet melalui pembinaan dan penggojlokan.

Pada waktu itu organisasi olahraga yang bernama Gerakan Latihan Olahraga (GELORA) yang di pimpin oleh Otto Iskandar Dinata sebagai ketua umum dan Soemali Prawirosoedirjo sebagai ketua harian meleburkan diri bersama-sama *Djawa Tengo Tai Iku Kai* (pusat olahraga versi Jepang) menjadi Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI). PORI secara resmi adalah organisasi yang mengurus dan memimpin gerakan olahraga di Indonesia. Pada bulan Januari 1947 mengadakan kongres darurat dan memilih Mr. Widodo Sastrodiningrat sebagai ketua PORI.

Persatuan Olahraga Republik Indonesia mengadakan hubungan dengan Menteri Pembangunan dan Pemuda Wikana. Berkat bantuan sekretaris menteri Drs. Karnadi, PORI dapat mengembangkan organisasi. Pada malam peresmian PORI bulan Januari 1947, Presiden Soekarno sekaligus melantik Komite Olimpiade Republik Indonesia (KORI), sebagai ketua ditunjuk Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan wakil ketua Koesmargono dan Soemali Prawirodirjo. KORI mempunyai tugas menangani masalah keolahragaan yang ada kaitannya dengan Olimpiade, saat itu KORI dibentuk karena Indonesia ingin ikut *Olympic Games* 1948, namun karena persiapan para atlet itu tidak memadai pengiriman ke London dibatalkan.

Diawal tahun 1950-an olahraga telah mengalami perluasan makna, olahraga yang awalnya adalah sebuah upaya untuk menjaga kesehatan jasmani kemudian berubah menjadi ajang persaingan antar negara.<sup>4</sup> Pergeseran makna itulah maka, pemerintah lokal maupun nasional terus memperbaiki dan mengembangkan prestasi keolahragaan. Melalui beberapa kebijakan dan usaha-usaha pembangunan khususnya olahraga, pemerintah berusaha mewujudkan Indonesia yang sehat melalui beberapa tindakan yang diperlukan saat itu. Misalnya, pembangunan stadion, pemenuhan fasilitas, dan upaya memperbaiki kualitas atlet melalui pembinaan dan penggojlokan.

---

<sup>4</sup> Aulia Rahman, *Olahraga dan Identitas Nasional: Pencak Silat di Indonesia Tahun 1950-1970*, Tesis, (Yogyakarta: UGM, 2002), hlm. 30.

Pada tahun 1957 untuk pertama kalinya dalam pidato 17 Agustus Presiden Soekarno menyinggung pentingnya pendidikan jasmani dan olahraga dalam rangka *nation building*. Pemerintah tidak hanya memperhatikan terhadap pelaksanaan pendidikan jasmani namun juga menganggap pendidikan jasmani sebagai *staatszorg* (urusan negara) dan menetakannya sebagai *staatsplicht* (keharusan negara). Perintah Presiden itu dituangkan dalam rencana pembinaan keolahragaan dinamai Rencana 10 Tahun Olahraga. Presiden Soekarno adalah peletak landasan pentingnya olahraga sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia.

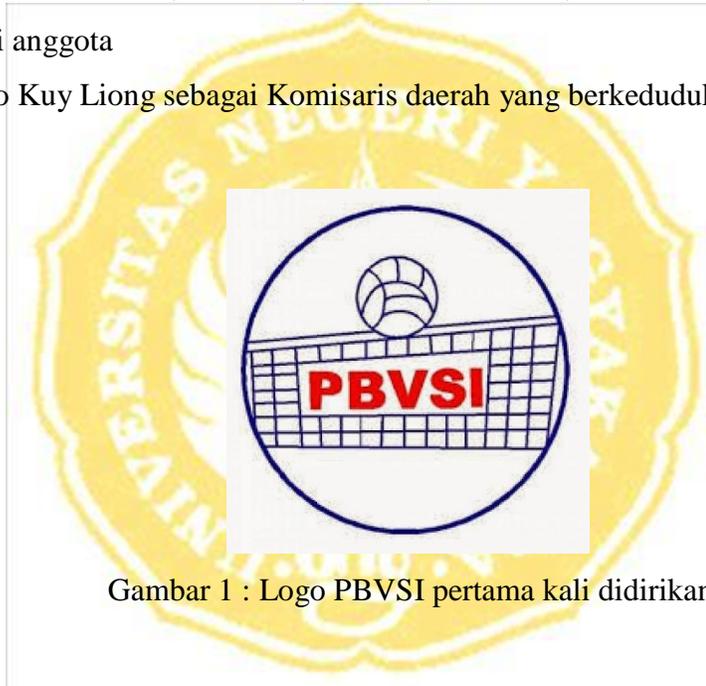
## **B. Perkembangan PBVSI Tahun 1955-1989**

Sejak Belanda memperkenalkan permainan bola voli, permainan tersebut terus berkembang dan akhirnya sampai setelah Indonesia merdeka permainan voli cukup pesat perkembangannya. Pada tahun 1953 dimana Pekan Olahraga Nasional (PON) III selesai diselenggarakan, Pengurus Ikatan Perhimpunan *Volleyball* Surabaya (I.P.V.O.S) mengadakan rapat pengurus pada pertengahan tahun 1954. Dalam rapat IPVOS tersebut menghasilkan ide atau keputusan untuk membentuk sebuah organisasi induk bola voli Nasional. Untuk mewujudkan ide tersebut, pengurus IPVOS mengirim seorang untuk menemui pengurus Komite Olimpiade Indonesia (KOI) di Jakarta. Pada waktu itu, atas bantuan dari dokter Aziz Saleh yang merupakan Ketua Komisi Teknik KOI, diadakanlah suatu pertemuan antara IPVOS (Ikatan Perhimpunan *Volleyball* Surabaya) dan PERVID (Persatuan *Volleyball* Indonesia Djakarta).

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa keputusan, antara lain: IPVOS dan PERVID menyetujui untuk menjadi sponsor atau perintis dalam mendirikan sebuah Top Organisasi atau induk organisasi bola voli di Indonesia. Menunjuk bapak Wim J. Latumetan yang merupakan tokoh olahraga sebagai format tunggal dengan tugas menjadi ketua atau pengurus pertama induk organisasi bola voli Indonesia. Kemudian pada 22 Januari 1955 diadakan rapat penyusunan pengurus organisasi bola voli Indonesia yang tertinggi tersebut yang bertempat di stadion Ikada Jakarta. Hari itu juga

merupakan hari resmi lahirnya induk organisasi bola voli nasional PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia). Dengan susunannya sebagai berikut.

1. Wim J. Latumetan sebagai Ketua
2. Erwin Baharudin sebagai Wakil ketua
3. Soewarno sebagai Penulis dan merangkap bendahara
4. S. Adi Widjaja sebagai Komisi pertandingan
5. Da Graza sebagai Komisi teknik dan pemilih
6. Alimuddin Nasution, Soemadi, R Heinz, Coenraad, W Jocom, dan Soebronto sebagai anggota
7. W. Kho Kuy Liong sebagai Komisaris daerah yang berkedudukan di surabaya



Gambar 1 : Logo PBVSI pertama kali didirikan

Pada bulan Maret 1955, PBVSI disahkan oleh KOI sebagai induk organisasi bola voli tertinggi di Indonesia. Pada tahun yang sama itu pula, PBVSI mendapat pengesahan sementara dari IVBF (International Volleyball Federation) yang merupakan induk organisasi bola voli dunia yang bermarkas besar di Paris, Perancis. Bulan Oktober 1959, PBVSI resmi menjadi anggota IVBF atau sekarang yang dikenal dengan sebutan FIVB. Pada saat itu ada 64 Negara anggota FIVB/ IVBF, dan PBVSI menjadi anggota yang ke 62. PBVSI sejak itu aktif mengembangkan kegiatan-kegiatan baik di dalam maupun ke luar negeri. Perkembangan permainan bola voli sangat

menonjol saat menjelang Asian Games IV 1962 dan Ganefo I 1963 di Jakarta, baik untuk putra maupun untuk wanitanya. Dari berbagai ajang tersebut makin menguatkan gairah pervolian di Indonesia. Sebagai dampaknya berbagai klub dan sarana lapangan bola voli sangat mudah dijumpai diberbagai pelosok tanah air. Permainan bola voli ini ternyata diterima dihati masyarakat Indonesia seperti olahraga lain yakni sepak bola dan bulutangkis.

### **C. Pengaruh Politik Terhadap PBVSI Tahun 1955-1989**

Kondisi politik Indonesia pasca kemerdekaan, baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh hasil KMB,<sup>5</sup> yang memunculkan rasa ketidakpuasan diberbagai kalangan politisi maupun militer diberbagai daerah. Pasca KMB Negara RI menjadi berbentuk Negara Serikat, yaitu Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang pelaksanaannya berdasarkan konstitusi RIS yang bercorak parlementer atau liberal. Walaupun kemudian sejak bulan Agustus 1950 Negara RIS berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang pelaksanaannya berdasarkan Konstitusi atau UUDS 1950, corak demokrasi dan pemerintahannya masih bersifat parlementer atau liberal. Oleh karena itulah pada masa pelaksanaan UUD RIS maupun UUDS 1950 lebih dikenal dengan masa Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal.

---

<sup>5</sup> Hasil KMB, 2 Agustus-3 November 1949, yang mempunyai dampak baik secara ekonomi maupun politik, antara lain: 1. Belanda akan menyerahkan kedaulatannya (transfer of sovereignty) kepada Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) paling lambat pada akhir bulan Desember 1949; 2. Penyelesaian masalah Papua (Irian Barat) akan dilanjutkan atau diselesaikan dalam satu tahun kemudian (ditunda sampai satu tahun berikutnya); 3. RIS sebagai Negara yang berdaulat penuh harus senantiasa bekerja sama dengan Nederland (Belanda) dalam suatu perserikatan (Uni) yang dipimpin oleh Ratu Belanda atas dasar sukarela dengan kedudukan dan hak yang sama; 4. RIS harus mengembalikan semua hak milik Belanda dan memberi hak konsesi kepada Belanda, serta izin baru bagi perusahaan-perusahaan (terutama milik Belanda); 5. RIS harus menanggung atau membayar semua bekas atau sisa hutang Hindia Belanda; 6. Dalam bidang militer akan dibentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) dengan TNI sebagai kekuatan intinya.

Selama masa ini sering terjadi jatuh bangunnya kabinet, dan terbukti telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet dimana umur rata-rata setiap kabinet hanya sekitar satu tahun.<sup>6</sup> Selama masa Demokrasi Liberal yang menggunakan UUDS 1950 telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet, antara lain: Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952), Kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953), Kabinet Ali Sastromidjojo II (Maret 1956-Maret 1957) dan Kabinet Djuanda (Maret 1957-Juli 1959).<sup>7</sup>

Demokrasi Liberal telah merubah demokrasi menjadi ajang perebutan kekuasaan dan sumber daya ekonomi belaka. Mereka di parlemen dan hampir di semua lembaga Negara dan bahkan di masyarakat berlomba-lomba ingin menjadi pemenang. Masalahnya kemudian adalah mereka yang menang justru lebih mementingkan kepentingan pribadi, golongan dan partainya. Oleh karena itu, diskusi-diskusi atau rapat-rapat di tingkat lembaga penyelenggara pemerintahan lebih syarat diwarnai perdebatan sengit untuk memenangkan kepentingan para politisi atau elit penguasa daripada membahas inti demokrasi yang substansial yaitu, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Kondisi ekonomi Indonesia pada waktu itu, sejak pasca kemerdekaan hingga tahun 1958 masih memprihatinkan, terpuruk dan dipandang belum memungkinkan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga Internasional semacam Asian Games.<sup>8</sup> Ditambah lagi penyelesaian berbagai permasalahan ekonomi, politik dan pemulihan keamanan pada tahun 1950-an, termasuk didalamnya adalah penyelesaian masalah

---

<sup>6</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, Vol. 2: 1950-1964 (Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1985). Cetakan Keenam, hlm. 18-140.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>8</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Dari Gelora Bung Karno ke Gelora Bung Karno*, op.cit., hlm. 55.

PRRI-Permesta dan pergolakan daerah lainnya, semua itu menguras perhatian pemerintah, yang berdampak pada ikut campur tangannya kekuatan-kekuatan asing. Namun demikian, pemerintah Indonesia tetap mengajukan proposalnya kepada sidang AGF di Tokyo pada tanggal 23 Mei 1958.

#### **D. Prestasi PBVSI di Kancah Internasional**

Sejak tahun 1950 Komite Olympiade Indonesia (KOI) telah berupaya agar Indonesia dapat diterima menjadi anggota negara dalam Komite Olympiade Internasional/ KOI (*International Olympic Committee/ IOC*) yang berpusat di Lausanne, Swiss. Pada tahun 1952 KOI diterima menjadi anggota IOC. Bahkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX disahkan menjadi ketua IOC yang pertama di Indonesia. Indonesia mengikuti Olimpiade XV di Helsinki. Pengiriman rombongan yang pertama kali ke olimpiade ternyata mendapat perhatian yang sangat besar di Indonesia dan luar negeri. Meskipun Indonesia baru pertama kali mengikuti Olympiade, partisipasi ini sangat berharga bagi para atlet dan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia.

Seiring dengan kondisi politik kenegaraan, presiden Soekarno kala itu ingin menjadikan olahraga sebagai instrumen revolusi pembangunan yang multikompleks, baik kedalam maupun keluar negeri. Salah satu kampanye yang menonjol adalah olahraga dijadikan *Nation an character building*. Sehubungan dengan itu dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 94 tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962, tentang pembentukan Departemen Olahraga (Depora) yang bertugas mengatur, mengkoordinasikan, mengawasi, membimbing, dan bila perlu menyelenggarakan kegiatan olahraga termasuk pendidikan jasmani di sekolah sampai perguruan tinggi.

Pada tanggal 24 Agustus-4 September 1962 di Jakarta Asean Games ke IV, amanat Presiden Soekarno kepada delegasi Indonesia saat akan berangkat ke Asean Games III di Tokyo. Delegasi saat itu dipimpin oleh Sri Paku alam dan Maladi selaku wakil. Semboyan Asean Games IV, "*Ever Onward, No Retreat*", dengan tekad dapat melebihi yang telah dilaksanakan di Tokyo. Untuk itu segala *funds and forces* harus dikerahkan, karena penyelenggaraan Asean Games IV merupakan "*national pride and*

*blam*”. Ada 14 cabang olahraga yang dipertandingkan. Indonesia meraih 11 medali emas, dan menduduki peringkat kedua dibawah Jepang. M Sarengat berhasil tampil sebagai manusia tercepat Asia.

Pada perhelatannya ini, Indonesia menolak keikutsertaan Israel dan Taiwan, karena dianggap sebagai bangsa imperialis. Alasannya adalah karena Indonesia merasa simpati terhadap Republik Rakyat Cina (RRC) dan Negara-negara Arab. Tindakan pelarangan ini kemudian memancing protes dari Komite Olympiade Internasional (IOC), dan mempertanyakan legitimasi. Konflik antara Indonesia dengan IOC memuncak ketika Indonesia diskors untuk tidak dapat mengikuti Olympiade Tokyo pada tahun 1964.<sup>9</sup> Atas hal tersebut, Soekarno kemudian menyatakan keluar dari keanggotaan IOC, dan menganggap kenaggotaan organisasi tersebut sebagai perpanjangan tangan dari kepentingan neo kolonialisme dan imperialism.

Keputusan IOC yang menghukum Indonesia dalam Olympiade karena menolak keikutsertaan Israel dan Taiwan dan Asian Games yang sedianya akan dilaksanakan di Jakarta pada tahun 1962, dianggap pertentangan dengan semangat konferensi Asia-Afrika di Bandung. Oleh karena itulah kemudian digagas untuk membuat asosiasi olahraga yang berorientasi kepada Nefo atau New Emerging Forces dan benar-benar mencerminkan semangat KAA di Bandung.<sup>10</sup>

Indonesia mengundang sebanyak 17 negara yang termasuk dalam kelompok Nefo di Asia, Afrika, Amerika Latin, maupun Negara-negara sosialis lainnya dalam rangka pembahasan Games of The New Emerging Forces (Ganefo). Undangan dari pihak Indonesia mendapat sambutan baik dari Negara-negara undangan dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan konferensi konferensi yang berlangsung pada tanggal 17 hingga 19 April 1963, dan sebagian besar peserta bersepakatan untuk mengadakan

---

<sup>9</sup> [www.blogharyana.blogspot.com/2010/11/ganefo event tandingan Olimpiade buatan.html](http://www.blogharyana.blogspot.com/2010/11/ganefo-event-tandingan-Olimpiade-buatan.html), diakses pada tanggal 10 Agustus 2016, pukul 09.00 WIB.

<sup>10</sup> Lutan, Rusli, *Manusia dan Olahraga*, (Bandung: ITB, 2002), hlm. 53.

Ganefo di Jakarta.<sup>11</sup> Selain dari sisi keanggotaannya, nuansa politik juga terlihat tujuan dari Ganefo yang pada pokoknya adalah untuk memperkuat rasa persaudaraan dan rasa solidaritas antar peserta. Hal ini sangat berbeda dengan kompetisi dunia yang lain seperti Olympiade atau Asian Games, yang memang berorientasi pada olahraga murni yang pokok tujuannya diukur dengan prestasi.

Bersamaan dengan hal tersebut, pada tahun 1960-an, dunia olahraga di Indonesia dapat dikatakan sedang berada dalam masa puncak. Rakyat dan pemerintah, terutama Soekarno, senantiasa berpadu untuk membangun perlengkapan-perengkapan untuk memajukan olahraga di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dengan pemancangan tiang pertama kompleks Gelora Bung Karno dilakukan sendiri oleh Soekarno pada 8 Februari 1960. Setelah itu, berbagai fasilitas penunjang olahragapun banyak terwujud, seperti Istana Olahraga (Istora) yang selesai dibangun pada 21 Mei 1961, Stadion Renang, Stadion Madya, dan Stadion Tennis yang selesai dibangun juga pada tahun 1961, gedung basket pada Juni 1962, dan Stadion Utama pada tahun 1962. Perkembangan yang baik ini sangat mendukung dalam pelaksanaan Ganefo dari sisi sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pertandingan.

Pada akhirnya Ganefo dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 10-22 Nopember 1963, yang menghadirkan 51 bendera nasional yang mewakili Negara atau kekuatan progressif.<sup>12</sup> Prestasi Indonesiapun cukup membanggakan di ajang Ganefo ini, yaitu menempati urutan ketiga, setelah RRT dan USSR, dengan perolehan 21 emas, 25 perak, dan 35 perunggu. Ganefo kedua yang sedianya dijadwalkan di Mesir pada tahun 1967, pada akhirnya gagal diselenggarakan karena persoalan politik dunia pada saat itu, dan di Indonesia pun juga telah mengalami perubahan politik.

## **E. KESIMPULAN**

Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) adalah induk organisasi bola voli nasional. PBVSI mempunyai peran untuk mengatur regulasi pertandingan dan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>12</sup> General programme: Ganefo 1 Jakarta November 1963.

peraturan umum bola voli di Indonesia. Pada tanggal 22 Januari 1955 diadakan rapat penyusunan pengurus organisasi bola voli Indonesia bertempat di stadion Ikada Jakarta. Hari itu juga merupakan hari resmi lahirnya induk organisasi bola voli nasional PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia). Setelah itu pada bulan Maret 1955, PBVSI disahkan oleh KOI sebagai induk organisasi bola voli tertinggi di Indonesia. Pada tahun yang sama itu pula, PBVSI mendapat pengesahan sementara dari IVBF (International Volleyball Federation) yang merupakan induk organisasi bola voli dunia yang bermarkas besar di Paris, Perancis. Oktober 1959, PBVSI resmi menjadi anggota IVBF atau sekarang yang dikenal dengan sebutan FIVB. Pada saat itu telah ada 64 negara anggota FIVB/ IVBF, dan PBVSI menjadi anggota yang ke-62.

PBVSI sejak itu aktif mengembangkan kegiatan-kegiatan baik ke dalam maupun keluar negeri sampai sekarang. Perkembangan permainan bola voli sangat menonjol saat menjelang Asian Games IV 1962 dan Ganefo I 1963 di Jakarta, baik untuk pria maupun untuk wanitanya. Setelah tahun 1962 perkembangan bola voli seperti jamur tumbuh di musim hujan banyaknya klub-klub bola voli di seluruh pelosok tanah air. Hal ini terbukti pula dengan data-data peserta pertandingan dalam kejuaraan nasional. PON dan pesta-pesta olahraga lain, di mana angka menunjukkan peningkatan jumlahnya. Boleh dikatakan sampai saat ini permainan bola voli di Indonesia menduduki tempat ketiga setelah sepak bola dan bulutangkis. Untuk pertamakalinya dalam sejarah perbolavolian Indonesia, PBVSI telah dapat mengirimkan tim bola voli junior Indonesia ke Kejuaraan Dunia di Athena Yunani yang berlangsung dari tanggal 3-12 September 1989. Pada saat itu pelatihnya bernama Slamet Mulyanto, dari Sidoarjo Jawa Timur. Beliau juga mantan atlet nasional Indonesia. Sekarang olahraga tidak menjadi kegiatan elit yang mahal tetapi menjadi kegiatan yang merakyat dan merasuki seluruh kehidupan masyarakat. Banyak hari besar nasional yang dapat dimeriahkan dengan pertandingan olahraga, salah satunya olahraga bola voli.

## DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

BPAD Yogyakarta, *Surat dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kepada Gubernur DIY tentang pengukuhan Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan PON X tahun 1981 dan Pelimpahan wewenang kepada Gubernur DKI Jakarta tertanggal 30 November 1979, No. 078 tahun 1979*

BPAD Yogyakarta, *Berkas tentang Pekan Olahraga Mahasiswa ke VIII DIY di Makassar (1969)*

Buku:

A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2012.

Brigitta Isworo Laksmi & Primastuti Handayani, *MF. Siregar Matahari Olahraga Indonesia*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2008.

C.J. Stolk, *Indonesia Langkah Pertama ke Olympiade XV Helsinki 1952*, Bandung: Badan Penerbitan G. Kolff & Co. 1952.

Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

John D. Legge, *Sukarno: Biografi Politik*, Jakarta: Sinar Harapan, 2001.

Helius Syamsudin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta : Bentang, 2005.

Lutan, Rusli, *Manusia dan Olahraga*, Bandung: ITB, 2002.

Rijsdorp K, *Olahraga Volley ball*, Jakarta: J.B Wolters Groningen, 1956.

Sartono Kartodirjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982.

Stolk, C. J. *Indonesia Langkah Pertama Ke Olympiade XV Helsinki 1952*, Bandung:Badan Penerbitan G.Kolff & Co,1952.

Tim Prodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Prodi Ilmu Sejarah, 2013.

Tim Prodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Prodi Ilmu Sejarah, 2013.

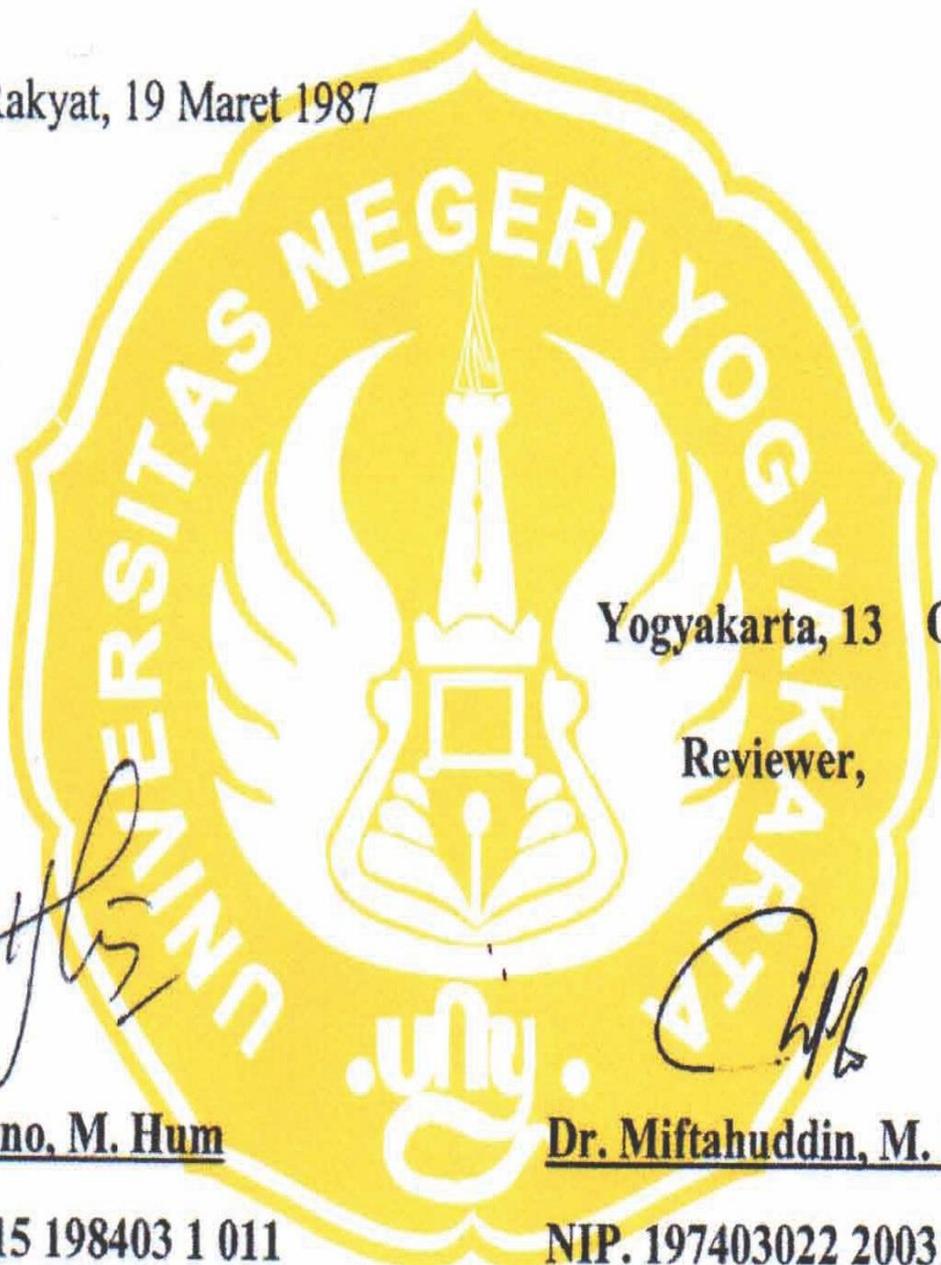
Skripsi:

Aulia Rahman, "Olahraga Dan Identitas Nasional : Pencak Silat Di Indonesia Tahun 1950-1970", *Tesis*, Yogyakarta: UGM, 2002

Koran:

Kedaulatan Rakyat, 19 Maret 1987

Kedaulatan Rakyat, 19 Maret 1987



Yogyakarta, 13 Oktober 2017

Pembimbing,

Reviewer,

Mudji Hartono, M. Hum

Dr. Miftahuddin, M. Hum

NIP. 19550115 198403 1 011

NIP. 197403022 200312 1 006